

V. SIMPULAN& SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Analisis menunjukkan secara keseluruhan faktor yang menjadi penyebab timbulnya SiLPA atau SiKPA yaitu tidak mampu menyesuaikan antara target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah , hal ini sangatlah tidak mudah untuk dilakukan , dikarenakan pembangunan daerah yang meningkat setiap tahunnya guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan , sehingga terjadinya ketidakefisiensinya anggaran . Dan kota Bandarlampung termasuk dalam daerah yang masih rendah dalam kemandirian daerahnya , peran pemerintah pusat masih dibutuhkan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya SiLPA atau SiKPA dalam APBD kota Bandarlampung dalam kurun waktu 2008 sampai 2013 adalah ; realisasi pendapatan daerah yang kurang, Realisasi belanja daerah yang melebihi target ,dan Realisasi belanja daerah kurang dari yang ditargetkan.

3. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan menggunakan analisis korelasi Karl Pearson, mendapatkan r sebesar 0,5 untuk hubungan variabel X_1 (Pendapatan) dan Y (SiLKPA) yang berarti korelasi linier positif dan berkorelasi sedang.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan menggunakan analisis korelasi Karl Pearson, mendapatkan r sebesar 0,257 yang artinya korelasi linear positif untuk variabel X_2 (Belanja Daerah) dan Y (SiLKPA). Memiliki hubungan korelasi lemah.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kinerja keuangan daerah kota Bandar Lampung selama tahun 2008 sampai tahun 2013, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah adalah 18% pertahun, memiliki rasio kemandirian 92,70%, rasio efektivitas 109,38%, rasio efisiensi 105,83%.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran, yakni ;

1. Sebaiknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat diminimalisir dengan menaikkan belanja daerah baik anggaran untuk belanja modal, belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.
2. Sebagai bentuk pengendalian, penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang

dicapai. Untuk itu diperlukan analisis varians (selisih) agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya SiLPA ataupun SiKPA dan tindakan antisipasi ke depan.

3. Proporsi alokasi anggaran untuk belanja publik dalam APBD perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos, belanja daerah lainnya, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan lagi.